

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

1. LATAR BELAKANG.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan dan Penyesuaian Mekanisme Kerja. Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 dan 2022 telah melaksanakan tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan. Sedangkan tahapan akhir dari Penyederhanaan Birokrasi adalah Penyesuaian Sistem Kerja yang didasarkan pada Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 26 Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tersebut menyatakan bahwa peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peran koordinasi pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di dituangkan dalam fungsi Subkoordinator dan untuk mekanisme kerjanya diatur dalam bab tata kerja. Terhadap kebijakan tersebut maka peraturan Bupati Bantul tentang SOTK perlu diubah dan disesuaikan dengan kebijakan mekanisme kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Selain penyelarasan terhadap Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, beberapa Perangkat Daerah juga melakukan evaluasi dan penyesuaian dengan peraturan teknis yang mengatur tentang pelaksanaan urusan pada masing-masing Perangkat Daerah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

1. Menidaklanjuti Pasal 26 Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 yang mengamanatkan untuk menghilangkan peran koordinasi pada pejabat administrasi (Pejabat Administrator dan Pengawas), maka fungsi koordinator dan subkoordinator dalam Peraturan Bupati Bantul tentang SOTK dihilangkan dan fungsinya disesuaikan pada fungsi struktur yang ada di atasnya.
2. Penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah agar terwujud Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul yang Agile.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud Penyusunan Raperbub SOTK adalah untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang Penyederhanaan Birokrasi pada tahapan Penyesuaian Sistem Kerja.
2. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur organisasi yang ramping (miskin struktur) tetapi kaya fungsi dan mekanisme kerja birokrasi yang agile.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang ramping dengan miskin struktur akan tetapi kaya fungsi.
2. Terwujudnya birokrasi pemerintah Kabupaten yang agile.

3. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok pikiran:

Menindaklanjuti Permenpan No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah.

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:

1. Kedudukan Perangkat Daerah;
2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5. Tata Kerja

4. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Untuk Perangkat Daerah

Sebagai dasar kelembagaan Perangkat Daerah yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
2. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
4. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
9. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
10. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
11. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

16. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
17. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
21. Rancangan Peraturan Bupati Bantul Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
22. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
23. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
24. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
26. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Kabudayan)
27. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
28. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
29. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat

Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;

30. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Kesehatan;
31. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Lingkungan Hidup;
32. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
33. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
34. Rancangan Peraturan Bupati Bantul Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
35. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan;
36. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
37. Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
38. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Saras Adyatma.

- **Untuk Pemerintah Kabupaten**

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan masing-masing Perangkat Daerah.

b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan pencabutan Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Kabudayan*)
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Kesehatan;
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan;
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Saras Adyatma.

Demikian keterangan/penjelasan kami sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Kepala Bagian Organisasi {



Agus Sriyana, SH

NIP. 196704211996031002